

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIYO SUPRIYATNO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 1001118

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **303.000.000**

1. MOBIL, KIJANG INNOVA DIESEL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOTOR, HUNDA NF100 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 5TL MIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA NF11T11C01MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA L1F02N37L2A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **318.938.500****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **2.421.938.500**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.421.938.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.